

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan negara Tiongkok dapat ditelusuri kembali ketika Amerika Serikat pertama kali memperoleh kemerdekaan. Hubungan antara kedua negara telah sampai tahun-tahun terakhir, cukup kuat, kompleks dan bahkan agak positif dalam berbagai aspek. Kedua negara dulunya memiliki kemitraan ekonomi yang sangat luas, dan jumlah perdagangan yang besar antara kedua negara diperlukan untuk hubungan politik yang konstruktif, namun masalah yang signifikan memang ada seperti hubungan kerja sama ekonomi, persaingan hegemonik di Pasifik, dan kecurigaan timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing negara telah mengadopsi sikap saling waspada sebagai musuh potensial, sambil mempertahankan kemitraan ekonomi yang sangat kuat pada saat yang sama. Ini telah digambarkan oleh para pemimpin dunia dan akademisi sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia pada abad ke-21 (Soetjipto, 2014).

Jika dilihat, hubungan antara Amerika Serikat dan negara China merupakan hubungan yang sangat unik, dimana masing-masing negara menganggap yang lain sebagai musuh potensial yang kuat dan juga mitra ekonomi yang sangat baik. Selain itu kedua negara ini tidak benar-benar menjalin hubungan kerjasama yang baik dan tulus karena status kedua negara yang merupakan musuh dalam persaingan ekonomi, militer dan politik. Dimana keduanya terus berlomba-lomba untuk menjadi negara *super power* yang mendominasi dan menguasai dunia (Soetjipto, 2014).

Beberapa tahun terakhir ini isu Xinjiang kembali mendapat perhatian dari masyarakat internasional, isu yang

menyangkut minoritas Muslim Uyghur China di Xinjiang kembali memuncak ke permukaan hingga menarik perhatian dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dan lebih dari 30 negara telah mengutuk apa yang mereka sebut kampanye penindasan yang mengerikan terhadap minoritas Muslim Uyghur di wilayah barat Xinjiang. Beijing dituduh melakukan penindasan berskala luas terhadap minoritas Muslim Uyghurnya dimana hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip umum *Universal Declaration of Human Rights* yang di adopsi oleh majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 (Forsythe, 2000).

Amerika Serikat mengatakan anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk berbicara tentang serangan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Xinjiang China. Pembahasan isu tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung di New York pada tahun 2018. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan mengatakan bahwa PBB dan negara anggotanya memiliki tanggung jawab tunggal berbicara setelah para korban menceritakan kembali tekanan yang mereka rasakan dari negara. Sullivan mengatakan merupakan keharusan bagi negara anggota PBB untuk memastikan bahwa badan dunia tersebut bisa memantau pelanggaran HAM yang dilakukan China di Xinjiang dan memastikan bahwa Komisioner HAM PBB mendapat akses untuk masuk ke wilayah tersebut (BBC, 2018).

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat menerima laporan dari sumber terpercaya mengenai kematian, kerja paksa, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lain di berbagai kamp pelatihan tersebut. Washington juga mengkritik negara lain, termasuk beberapa negara Muslim, karena tidak melakukan sesuatu atau malah mendukung apa yang dilakukan China di Xinjiang. Amerika Serikat bahkan berencana

menyiapkan sanksi untuk dijatuhkan kepada pemerintah China yang kemudian tindakan tersebut mendapat respon dari negara China dengan menjadi tuan rumah para diplomat dari negara-negara seperti Pakistan, Rusia, Belarus, Kuba dan Venezuela dan beberapa negara lainnya untuk mengadakan tur di kamp-kamp pusat pelatihan kejuruan mereka di Xinjiang dan meyakinkan mereka untuk memboikot keputusan tersebut (Schwartz, 2019).

Michelle Bachelet, kepala HAM PBB, meminta China untuk mengizinkan penyelidikan independen atas laporan pelanggaran di daerah tersebut. Sekali lagi, tidak ada tindakan spesifik yang diuraikan. Beberapa anggota PBB, terutama sekutu Muslim China, percaya narasi China bahwa kamp-kamp tersebut adalah proyek keamanan nasional untuk memerangi terorisme. Selain itu pemerintah China melalui Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, menanggapi permohonan komisioner HAM PBB Michelle Bachelet untuk mengizinkan pengawas masuk ke Xinjiang. Geng mengatakan komisioner harus menghormati kedaulatan China dan tidak mendengarkan dan percaya informasi sepihak (BBC, 2018).

Selain itu pada tahun 2019 Amerika Serikat mengeluarkan Kejibakan The Uyghur Act yaitu kebijakan tentang Intervensi Uyghur dan Respon Kemanusiaan Global yang lolos dalam rapat Dewan Senat Amerika Serikat yang diajukan oleh senator Marco Rubio dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Namun kebijakan tersebut mendapat respon dari China dengan melarang kunjungan militer Amerika Serikat ke Hongkong, selain itu melalui Menteri Luar Negeri China Hong Cuying mengatakan “apa yang dilakukan China di Xinjiang adalah upaya Counter Terrorism dan De-Redicalization dan sebagai aksi dalam menjalankan kebijakan Global War on Terror 2001. Hong Cuying juga mengatakan isu yang dihadapi Xinjiang bukan

hanya tentang Etnik, Agama, dan HAM, akan tetapi sebuah perjuangan melawan terosime dan separatisme.

Melihat perkembangan dunia internasional yang semakin terbuka sekaligus berbahaya, rupanya isu diskriminasi dan pelanggaran HAM terkait agama Islam dan masyarakat Muslim mulai mendapat perhatian yang sangat baik dari masyarakat internasional dan semakin disoroti penyebabnya. Hal inilah yang kemudia membuat agama Islam dan masyarakat Muslim sering menjadi target perang kekuasaan, beberapa aktor internasional memanfaatkannya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya ataupun untuk menjatuhkan musuhnya. Amerika Serikat melalui media nasionalnya seperti BBC, CNN dan yang lainnya dalam merespon konflik yang terjadi di Xinjiang, menggunakan pernyataan-pernyataan yang menarik perhatian internasional tentang perlakuan buruk pemerintah Tiongkok tanpa melihat alasan dibalik aksi tersebut dan sisi positif dari pemerintah Tiongkok. Dimana isu-isu yang diberitakan oleh media-media Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Xinjiang hanya memperlihatkan salah satu sisi saja yangmana pernyataan tersebut merujuk pada tindakan anti Muslim yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok kepada minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dengan tujuan untuk menjatuhkan Tiongkok di kancah internasional dan terutama masyarakat Muslim global (Engdahl, 2018a).

Keadaan sebenarnya yang terjadi di Provinsi Xinjiang China mengenai Uyghur tidak mungkin untuk diverifikasi secara independen, apakah ada kamp seperti yang dituduhkan dan jika demikian siapa yang ada disana dan dalam kondisi apa. Apa yang diketahui, bagaimanapun adalah fakta bahwa badan intelijen NATO, termasuk Amerika Serikat dan Turki, bersama dengan Arab Saudi, telah terlibat dalam merekrut dan mengerahkan ribuan Muslim Uyghur Tiongkok untuk bergabung dengan Al Qaeda dan kelompok teror lain di

Suriah dalam beberapa tahun terakhir (Cartalucci, 2019b). Menurut media Suriah yang dikutip di *Voltaire.net*, saat ini diperkirakan ada 18.000 etnis Uyghur di Suriah yang paling terkonsentrasi di sebuah desa di perbatasan Turki ke Suriah. Sejak 2013 banyak tentara Uyghur yang telah disiapkan untuk pergi ke pertempuran bersama Al Qaeda di Suriah dan kembali lagi ke Xinjiang China dimana mereka telah melakukan berbagai aksi teroris. Ini adalah salah satu proyek jahat yang berkaitan dengan NATO untuk menanam benih teror dan kerusuhan di Cina. Sejak tahun 2011 pada awal perang NATO melawan Suriah Bashar al Assad, Amerika Serikat dan Turki telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi aliran orang-orang Uyghur Tiongkok untuk menjadi Jihadis di Suriah. dimana ribuan Uyghur ini bersembunyi di Suriah, sebagian besar di sekitar Idlib, pos terdepan teroris anti-rezim Bashar al Assad (Cartalucci, 2019b).

Organisasi kunci di balik radikalisasi pemuda Uyghur Tiongkok adalah *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM) dan front politiknya, *Turkestan Islamic Party* (TIP), yang juga dikenal sebagai "*Katibat Turkistani*". Organisasi ini dipimpin oleh Anwar Yusuf Turani yang saat ini berbasis di Washington DC. ETIM pindah ke Washington pada saat ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendaftarkannya sebagai organisasi teroris. Pada akhir 1998 Hasan Mahsum, juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Turkestani, pendiri Gerakan Islam Turkestan Timur, memindahkan markas ETIM ke Kabul, berlandung di bawah Afghanistan yang dikuasai Taliban. Di Afghanistan, para pemimpin ETIM bertemu dengan Osama bin Laden dan para pemimpin lain dari Al Qaeda yang dilatih CIA, Taliban, dan Gerakan Islam Uzbekistan untuk mengoordinasikan aksi-aksi di seluruh Asia Tengah (Cartalucci, 2018).

Beberapa fakta hubungan sensitif yang menghubungkan terorisme semu Islam yang dipimpin oleh pemimpin Islam

kontroversial, Fethullah Gülen, dengan badan intelijen Amerika Serikat, Inggris, dan Zionis. Fethullah Gülen, yang diyakini sebagai salah satu dari Turki, Gulen termasuk salah satu penggerak gerakan ETIM dan merupakan pendiri dan penggerak beberapa operasi terdepan untuk CIA dalam Islamisasi Asia Tengah. Gulen sendiri telah menetap di Amerika Serikat sejak tahun 1998 dan memiliki sejumlah besar uang yang digunakannya untuk membiayai beberapa gerakan dan proyek-proyeknya yang ia miliki, yang mana proyek-proyek tersebut memiliki perjanjian rahasia dengan Arab Saudi, Iran, pemerintah Turki dan CIA. dimana CIA adalah co-payer dalam membiayai proyek-proyek ini (Engdahl, 2018b).

Sebuah surat kabar Turki Hurriyet mencatat: CIA membiayai gerakannya gulen dengan arus kas sebesar \$ 25 - \$ 50 miliar yang dilaporkan, gerakan Gulen menjalankan lebih dari seribu sekolah di seluruh dunia, mendirikan universitas, menjalankan serikat pekerja, dan ratusan badan amal, perwalian, kelompok lobi, badan mahasiswa, surat kabar, stasiun radio dan saluran televisi yang didedikasikan untuk Islamisasi Asia Tengah. Gerakan ini memiliki ratusan ribu anggota, bahkan jutaan (Engdahl, 2018b).

Di antara orang-orang yang menulis surat referensi untuk permohonan Gulen adalah George Fidas, Graham Fuller dan Morton Abramowitz. George Fidas, seorang ahli tentang efek penyakit menular global pada keamanan nasional Amerika Serikat, bekerja di CIA selama 31 tahun dan menjabat sebagai wakil direktur CIA. Morton Abramowitz sangat terlibat dengan Mujahidin yang disponsori CIA di Afghanistan pada 1980-an, pernah menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki pada tahun 1989 pada masa pemerintahan Presiden George H.W. Bush (Engdahl, 2016).

Graham Fuller, yang juga mantan agen CIA, Fuller telah terlibat dalam kegiatan CIA dalam mengarahkan Mujahidin

dan organisasi Islam politik lainnya sejak 1980-an. Dia menghabiskan 20 tahun sebagai petugas operasi CIA yang ditempatkan di Turki, Libanon, Arab Saudi, Yaman, dan Afghanistan dan merupakan salah satu pendukung awal CIA dalam menggunakan Ikhwanul Muslimin dan organisasi Islam serupa untuk memajukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Cartalucci, 2018).

Gerakan Gulen mendirikan madrasah pada tahun 1990-an, sebagian besar di republik-republik Turki yang baru merdeka di Asia Tengah, Rusia dan di Xinjiang. Madrasah-madrasah ini digunakan sebagai sekolah pelatihan bagi al-Qaeda, dan berfungsi sebagai tempat bagi para pejabat CIA yang menyamar dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah tersebut. FSB, badan intelijen Rusia pun melarang gerakan Gulen dari Rusia karena bertindak sebagai organisasi depan untuk CIA (Engdahl, 2016).

Berdasarkan pada laporan berjudul *The Xinjiang Project*, ditulis oleh mantan perwira senior CIA Graham E. Fuller pada 1998 untuk Rand Corporation dan direvisi pada tahun 2003 dengan judul "The Xinjiang Problem." Fuller adalah salah satu sponsor utama CIA dan orang yang memfasilitasi pengasingan Gulen di Amerika Serikat. Dalam studinya sendiri tentang Xinjiang, CIA Graham E. Fuller mencatat bahwa kelompok-kelompok Arab Saudi telah menyebarluaskan literatur agama Wahhabi ekstremis dan senjata kecil melalui simpatisan di Xinjiang, dan bahwa Muslim Turki muda telah direkrut untuk belajar di madrasah di Pakistan, Afghanistan, dan Arab Saudi. Dia menambahkan bahwa Uyghur dari Xinjiang juga berperang bersama Al Qaeda Osama bin Laden di Afghanistan pada tahun 1980-an (Cartalucci, 2015a).

Pada tahun 1999, ketika berada di RAND (*Research And Development*) Corporation, Fuller menganjurkan menggunakan pasukan Muslim untuk melanjutkan kepentingan Amerika Serikat di Asia Tengah melawan China

dan Rusia (Engdahl, 2016). Fuller mencatat, "Uyghur memang berhubungan dengan kelompok-kelompok Muslim di luar Xinjiang, beberapa dari mereka telah diradikalisasi ke dalam politik jihad yang lebih luas dalam proses itu, beberapa sebelumnya terlibat dalam pelatihan teroris di Afghanistan, dan beberapa berhubungan dengan mujahidin Muslim internasional yang berjuang untuk Penyebab kemerdekaan Muslim di seluruh dunia. Fuller juga mendeklarasikan: *"The policy of guiding the evolution of Islam and of helping them against our adversaries worked marvelously well in Afghanistan against the Russians. The same doctrines can still be used to destabilize what remains of Russian power, and especially to counter the Chinese influence in Central Asia"*(Cartalucci, 2015a).

Menurut wartawan Eric Margolis, CIA menggunakan pihak ketiga dalam upaya untuk melatih orang Uyghur. "CIA akan menggunakan mereka jika terjadi perang dengan China, atau hanya untuk membuat mereka tetap di sana, mereka dilatih dan didukung di luar Afghanistan, beberapa dari mereka berkolaborasi dengan Osama bin Laden dan mereka ditempatkan di kamp pelatihan yang didanai Arab Saudi dan Amerika Serikat di Afghanistan sebelum tahun 2001 (Cartalucci, 2015b). Menurut Tony Cartalucci, seorang peneliti dan penulis geopolitik yang berbasis di Bangkok dalam artikelnya yang berjudul *China's Xinjiang Problem Made in USA* mengatakan Amerika Serikat melalui media nasionalnya seperti BBC telah menyebarkan berita palsu tentang peristiwa yang terjadi di Xinjiang hanya untuk memecah belahkan China dari dalam dan mejelekan China di antara komunitas Muslim global (Cartalucci, 2019a).

Menurutnya klaim-klaim yang diberitakan oleh media-media Amerika Serikat dan lembaga-lembaga LSM Hak Asasi Manusia terkait penganiayaan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM tidak dapat di buktikan kebenarannya dan bukan

merupakan fakta yang terdokumentasi, dengan sebagian besar klaim ini berasal dari segelintir kelompok Uyghur yang didanai langsung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui sebuah organisasi Hak Asasi Manusia, *National Endowment Democracy* (NED). Rujukan yang diberikat oleh media barat tentang pengasingan, diskriminasi, dan penghapusan budaya terhadap minoritas Muslim Uyghur adalah orang-orang Uyghur yang berasal dari *World Uyghur Congress* (WUC) yang merupakan bagian dari *Eastern Turkistan Islamic Movement* (ETIM) yang berbasis di Washington D.C, yang secara terbuka didanai oleh *National Endowment Democracy* (NED). NED adalah sebuah front Amerika Serikat yang didedikasikan khusus untuk campur tangan politik di seluruh dunia dan memiliki peranan dalam perubahan rezim yang didukung Amerika Serikat dimana-mana dari Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Afrika dan di seluruh Asia (Cartalucci, 2018).

Amerika Serikat juga menggunakan ISIS (*Islamic State of Irak and Syria*) untuk terlibat dalam menerima, melatih, dan mempekerjakan teroris dari provinsi Xinjiang China, ISIS adalah Pasukan Ekspedisi Global Washington dan merupakan hasil dari perang proxy yang disengaja dan direkayasa Amerika Serikat dan sekutunya ketika sedang berperang. ISIS dikenal sebagai ciptaan terbaru Amerika Serikat dan agen intelijen barat lainnya, seperti halnya Al Qaeda dan Ikhwanul Muslimin sebelum mereka. Separatis Uyghur yang didukung Amerika Serikat di provinsi Xinjiang yang paling barat di China telah bergabung dengan ISIS untuk pelatihan dengan maksud memimpin pemberontakan bersenjata melawan Beijing sekembalinya mereka (Cartalucci, 2014).

Operasi CIA yang signifikan seperti pembentukan jaringan Al-Qaeda untuk menghadapi Rusia di Afghanistan, pendanaan dan pelatihan kontras Amerika Tengah yang berjuang di bawah komando Amerika Serikat untuk

menggulingkan pemerintah Sandinista di Nikaragua, dukungan CIA dari Tentara Pembebasan Kosovo, yang dilatih di kamp-kamp teroris yang dijalankan oleh Osama bin Laden dan dibiayai oleh Amerika Serikat dan sekutunya semua contoh yang terdokumentasi ini telah dihilangkan sampai baru-baru ini, ketika terungkapnya operasi bendera palsu 9/11 akhirnya menyiagakan banyak orang dan memperlihatkan seberapa besar sponsor negara Amerika Serikat untuk kegiatan teroris (Chin, 2012).

Larry Chin mengatakan: "Ini adalah fakta sejarah yang mapan dan sengaja tidak tertangani bahwa CIA menciptakan Islam radikal dan terorisme Islam selama Perang Dingin. Ini juga merupakan fakta yang terdokumentasi bahwa Amerika Serikat, sekutunya, dan mereka badan-badan intelijen (CIA, ISIS, Al-Qaeda Pakistan, MI-6 Inggris, dll.) dari tahun 1970-an hingga saat ini terus menggunakan dan membimbing kelompok-kelompok teroris, sebagai aset intelijen dan propaganda. Untuk melayani kepentingan strategis Amerika Serikat, Inggris, dan Zionis, terorisme Islam sebagian besar merupakan senjata palsu yang menggunakan operasi rahasia dan operasi bendera palsu yang digunakan untuk melakukan perang proxy dimana-mana dan strategi yang samapun digunakan AS untuk melawan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang (Chin, 2013).

Dalam skripsi ini, penulis ingin menganalisis mengapa Amerika Serikat terlibat dalam konflik Uyghur di Xinjiang yang membuat konflik tersebut semakin parah dan memanas

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

*“Mengapa Amerika Serikat terlibat dalam konflik di Xinjiang ?”*

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Ofensif Neo-Realisme**

Kondisi internasional merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Kondisi internasional berkaitan langsung dengan kapabilitas yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Dalam masalah yang akan diangkat oleh penulis mengenai *“Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Etnis Uyghur dengan Pemerintahan Tiongkok di Xinjiang Tahun 1997-2019”* maka penulis akan menggunakan Teori yang sesuai dengan fenomena Hubungan Internasional dan kasus tersebut yaitu Ofensif Neo-Realisme atau *Offensive structural realism*.

Neorealisme percaya bahwa struktur sistem internasional bersifat anarki, yang berarti tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan dan pemerintah di atas pemerintahan. Struktur sistem internasional ini membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, hal inilah yang membuat negara yang mempunyai *power* lebih banyak memiliki pengaruh yang lebih besar. Neorealisme berbeda dengan perspektif realisme yang berfokus pada sifat alamiah manusia. Para pemikir realisme klasik, kekuasaan merupakan objek utama sehingga perlu diutamakan dan dimaksimalkan oleh suatu negara atau individu. Meskipun dalam realisme klasik, sumber daya ekonomi dan teknologi juga dianggap sebagai salah satu

elemen dari kekuasaan suatu negara, namun kekuatan militerlah yang tetap menjadi elemen terpenting bagi pembentukan kekuasaan sebuah negara. Neorealisme menyetujui beberapa hal yang sama, bahwa kekuatan militer adalah penting dalam kekuasaan.

Namun, bagi neorealisme, kekuasaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, kekuasaan menjadi instrumen yang menuntun serta membatasi sesuatu hal kepada negara-negara lain. Daripada kekuasaan itu sendiri, lebih difokuskan pada kemampuan penggunaan kekuasaan sebagai pertahanan negara (Waltz, 1979).

Neorealisme dapat dipahami dengan beberapa konsep atau asumsi dasarnya sebagai berikut :

- 1) Sistem internasional bersifat anarki. Keadaan anarki bukan berarti kekacauan. Keadaan anarki berarti tidak ada otoritas pusat yang mengatur tindakan negara-negara lain.
- 2) Sistem internasional menjadi faktor penting dalam menentukan perlakuan aktor.
- 3) Negara yang memiliki kedaulatan berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi dirinya dan meluaskan kekuatan nasional.
- 4) Negara adalah aktor yang rasional maka selalu mengejar strategi yang meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.
- 5) Ciri yang dapat ditemukan di sistem internasional adalah bahwa ketidakpastian

menyebabkan kurangnya kepercayaan. Ketidaktahuan atas motivasi dari negara lain membuat negara saling mengawasi satu dengan yang lain.

- 6) Ketidaktahuan tersebut kadang kala dapat menyebabkan kekeliruan dalam mengambil kebijakan nasional.
- 7) Sebab negara-negara ingin mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan maka kelangsungan hidup negara menjadi motivasi yang paling dasar atas perlakuan suatu negara.

Neorealisme juga percaya bahwa kekuatan merupakan sebuah alat untuk mencapai pertahanan negara (*survival*), dimana hal tersebut dapat di tempuh dengan salah satu pemahamannya yaitu *offensive structural realism*. *Offensive structural realism* beranggapan bahwa diperlukan peningkatan kekuatan supaya meraih posisi hegemoni dalam sistem internasional. Dengan menjadi hegemon, negara dapat memastikan posisi amannya untuk bertahan dalam sistem yang anarki. Menurut Mearsheimer dari bukunya yang berjudul "*Offensive structural realism*" mengandung 5 anggapan sebagai asumsi dasarnya, kebanyakan pemikir neorealis menyetujui asumsi dasar tersebut, 5 asumsi dasar realisme ofensif adalah yang berikut di bawah ini, (Handler, 2013).

- 1) Sistem internasional adalah anarki.
- 2) Negara yang memiliki *Great Power* pastinya memiliki kekuatan militer yang agresif.

- 3) Negara manapun tidak dapat memperkirakan sepenuhnya maksud dan keinginan oposisi.
- 4) Sasaran negara yang memiliki *Great Power* adalah kelangsung hidup negara itu sendiri.
- 5) Negara adalah aktor rasional.

Jika, 5 asumsi tersebut bersatu, negara yang memiliki *Great Power* mendapat motivasi yang kuat untuk bertindak dan berpikir agresif terhadap oposisi. Dalam kondisi anarki seperti ini, masing-masing negara tidak dapat memahami sepenuhnya niat dan tujuan masing-masing negara sehingga timbul kecurigaan terhadap negara yang memiliki kemampuan ofensif. Sebagai akibat, negara berusaha untuk mengekspansi kekuatan negaranya serta memberikan kerugian terhadap negara yang berpotensi menjadi musuh atau saingan untuk menurunkan kekuatannya. Inti dalam hal ini, negara *Great Power* bertindak (Jackson, Sorensen, 2014).

Tindakan-tindakan yang bercenderung mengekspansi kekuatan negara akan berakhir, setelah negara tersebut menjadi hegemon. Sehingga, hendaknya negara-negara *Great Power* selalu ingin menjadi satu-satunya hegemon di dunia namun hal tersebut tidak akan dapat tercapai kecuali negara memiliki kekuasaan nuklir yang mutlak dimana negara-negara lain tidak dapat menerkam. Akan tetapi, objek utama negara-negara yang memiliki *Great Power*, tetap saja menjadi hegemon, terutama hegemon di regionalnya. Setelah menjadi hegemon di regionalnya, mereka mengintervensi di wilayah lain supaya menjaga

*Balance of Power*, dengan kata lain berefek sebagai *Offshore Balancer* (Jackson, Sorensen, 2014).

## 2. Konsep Proxy War

*Proxy War* merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadapan- hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Perang ini dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri atau aktor lain yang beroperasi tentu saja dengan memanfaatkan masyarakat lokal atau setempat. Perang proxy tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh menggunakan dan mengendalikan actor non state. Indikasi adanya *Proxy War* diantaranya Gerakan separatis, Demonstrasi massa dan Bentrok antar kelompok.

Terdapat 2 cara dalam melakukan Perang Proxy ini yaitu dengan *Soft Power* dan *Hard Power*. *Soft power* adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan, menyatakan bujukan sebagai kekuatan persuasif berdasarkan daya tarik dan emulasi dari sumber daya budaya, ideologi, dan lembaga.

Proxy war cenderung dimulai dengan soft power mulai dari diplomasi, pemberian donasi, sampai dengan membina kelompok insurjensi (*dissident*) dalam suatu negara. *Enemy's enemy is friend* kerap diimplementasikan dalam melakukan soft power. Pada skala tertentu ketika soft power tidak efektif lagi maka dilakukan hard power dalam bentuk embargo, intervensi politik, dan intervensi militer melalui upaya-upaya penentangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal melalui organisasinya sejalan dengan keinginan yang telah ditularkan oleh negara-negara besar sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Hidayat, Gunawan, 2017).

### 3. Penerapan Teori

Berdasarkan paparan teori Ofensif Neo-Realisme diatas, jika dikaitkan dengan dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Uyghur dikarenakan Amerika Serikat ingin mengekspansi kekuatan negaranya serta memberikan kerugian terhadap negara Tiongkok yang berpotensi menjadi musuh atau saingannya untuk menurunkan kekuatannya. Dimulai dari mempolitisasi Islam dengan menanam paham-paham radikal, membiayai dan mendukung gerakan Islam radikal serta menggunakannya sebagai wadah ketika dibutuhkan untuk menekan kekuatan negara- negara yang berpotensi menjadi saingannya. Amerika Serikat telah bertindak seperti ini sebelumnya terhadap negara Rusia, cara yang sama juga dilakukan terhadap negara Tiongkok, dimana motivasi Amerika Serikat bertindak seperti ini dikarenakan letak geografis dan potensi daerah otonomi Xinjiang yang dapat meningkatkan kekuatan politik serta ekonomi negara Tiongkok. Xinjiang adalah penghasil terbesar kapas, lavender, dan hop. Areal tanaman lavender dan produksinya di Kabupaten Ili merupakan 90% dari total tanaman nasional. Selain itu, dengan padang rumput terbesar kedua, Xinjiang merupakan salah satu daerah peternakan domba dan wol yang menjadi basis produksi di Cina. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi.

Wilayah ini memiliki cadangan terbesar minyak, gas alam dan batu bara di dalam negeri. Adapun cadangan batubara sebesar 40% dari total negara. Cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Tarim, Junggar dan Turpan-Hami wilayah Xinjiang ialah seperempat dan sepertiga dari total negara (Karisma, 2019). Xinjiang bahkan memiliki sumber daya mineral yang besar juga. Ada lebih dari 130 jenis deposit mineral didirikan. Cadangan beryllium and mica di daerah ini adalah yang tertinggi di China. Selain itu, secara geopolitik, wilayah Xinjiang memang sangat penting

terutama karena wilayah ini merupakan wilayah penyangga atau *buffer zone* bagi China. Wilayah ini juga menjadi semakin penting karena berdekatan dengan Asia Tengah (Kartini, 2015).

Kebangkitan China di segala aspek dan pengaruh China di hampir semua negara serta posisi dan hubungannya dengan Amerika Serikat membuat negara ini patut diwaspadai dan membuat Amerika Serikat harus mengambil langkah dan bertindak agresif untuk menekan perkembangan tersebut salah satunya adalah dengan mengganggu stabilitas wilayah di daerah Xinjiang agar dapat mempengaruhi dan menekan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi hegemoni China melalui kekuatan ekonomi dan politiknya.

#### **D. Hipotesis**

Amerika Serikat terlibat dalam konflik yang terjadi di Xinjiang disebabkan oleh Amerika Serikat sebagai aktor rasional maka selalu mengejar strategi yang meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan berupa :

- 1) Upaya AS Membendung Pengaruh Perluasan Cina ke Arah Barat Melalui Xinjiang
- 2) Perang Hegemoni Amerika Serikat & Cina di Asia Tengah.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba untuk menjelaskan tentang masalah yang dibahas. Sedangkan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana penulis menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku teks, artikel,

jurnal, majalah, surat kabar, serta data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian akan dibahas dan disusun secara sistematis (Jatmika, 2016).

## **F. Batasan Penelitian**

Penulis membatasi tulisan ini agar fokus dan tidak kesulitan dalam mengumpulkan data. Fokus dimulai pada tahun 1997 saat konflik semakin memanas hingga munculnya gerakan separatisme dan aksi teror dan terlibatnya CIA dalam konflik tersebut dimana pada tahun 1998 Hasan Mahsum, juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Turkestani, pendiri Gerakan Islam Turkestan Timur, memindahkan markas ETIM ke Kabul, berlindung di bawah Afghanistan yang dikuasai Taliban. Di Afghanistan, para pemimpin ETIM bertemu dengan Osama bin Laden dan para pemimpin lain dari Al Qaeda yang dilatih dan dibiayai CIA, Taliban, dan Gerakan Islam Uzbekistan untuk mengoordinasikan aksi-aksi di seluruh Asia Tengah (Cartalucci, 2018).

Hingga serangkaian peristiwa sampai tahun 2018 dimana Amerika Serikat dalam rapat Pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) yang sedang berlangsung di New York. Amerika Serikat melalui Wakil Menteri Luar Negerinya John Sullivan berupaya mengintervensi konflik Xinjiang atas nama agama dan kemanusiaan dan meminta agar china diberi sanksi atas pelanggaran HAM, serta tahun 2019 Amerika Serikat mengeluarkan Kebijakan *The Uyghur Act* tentang Intervensi Uyghur dan Tindakan Respon Kemanusiaan Global yang lolos dalam rapat Dewan Sehat Amerika Serikat yang diajukan oleh senator Marco Rubio dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

## G. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Menganalisa alasan keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Xinjiang di China pada tahun 1997-2019.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi motivasi peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang masalah yang serupa.

## H. Sitematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan penulisan yang sesuai dengan kaidah baku maupun aturan penulisan pada suatu karya ilmiah. Berikut susunan atau sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I** merupakan bab pengantar yang didalamnya berisi pendahuluan yang membahas mengenai : Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** akan membahas mengenai ketidakpedulian Amerika Serikat terhadap dinamika konflik Xinjiang sebelumnya.

**Bab III** akan berisikan alasan meningkatnya kepedulian Amerika Serikat terhadap isu Xinjiang.

**Bab IV** berisi tentang dugaan sementara atau hipotesa, pada BAB IV A berisikan penjelasan mengenai AS ingin membendung pengaruh perluasan Cina ke arah barat melalui Xinjiang dengan proxy war. Dan pada BAB IV B berisikan penjelasan mengenai perang hegemoni Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Tengah.

**Bab V** merupakan bab terakhir pada penelitian ini, yang akan berisikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian dan data yang dipaparkan.